NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan
Volume 7, Issue 4, November 2026
DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v7i4.6812
Homepage: ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra

p-ISSN: 2715-114X
e-ISSN: 2723-4649
pp. 3123-3139

OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH

Abdul Halim*[1], Oleh[2], Okke Rosmaladewi[3]
Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia
**Corresponding author email: abdulhalim@gmail.com*

Article History

Received: 24 June 2026
Revised: 2 October 2026
Published: 24 November 2026

ABSTRACT

Educational planning and budgeting are essential components in improving school quality, particularly in vocational education institutions that require more complex learning resources and management. Vocational high schools (SMKs) need not only funding for general learning activities but also for vocational practice, procurement of equipment and materials, teacher competency development, maintenance of facilities and infrastructure, and the strengthening of partnerships with business and industrial sectors. This study aims to describe and compare the optimization of educational planning and budgeting as instruments for improving school quality at SMKN 1 Panyingkiran and SMKN 1 Kertajati. The research focuses on school program planning, the preparation of the School Activity and Budget Plan (RKAS), budget prioritization, stakeholder involvement, transparency, accountability, budget evaluation, and their contributions to school quality improvement. A qualitative approach with a comparative descriptive design was employed. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The participants included principals, treasurers, teachers, school committee members, and students. Data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification, supported by source and method triangulation to ensure credibility. The findings indicate that educational planning and budgeting play a strategic role in enhancing school quality in both institutions. Similarities were found in the use of RKAS as the primary framework for program and budget management, the importance of stakeholder participation, and the implementation of transparency and evaluation mechanisms. Differences emerged in budget priorities, particularly regarding vocational facilities, areas of specialization, and school development strategies. The study concludes that participatory, transparent, accountable, and needs-based educational planning and budgeting are critical instruments for achieving sustainable school quality improvement.

Keywords: *educational planning, educational budgeting, RKAS, school quality, vocational high school*

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Halim, A., Oleh, & Rosmaladewi, O. (2026). OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7 (4), 3123–3139 https://doi.org/10.55681/nusra.v7i4.6812

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran pendidikan merupakan komponen fundamental dalam tata kelola sekolah yang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Sekolah yang memiliki perencanaan yang sistematis akan lebih mudah menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, anggaran tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif yang memuat penerimaan dan pengeluaran dana, melainkan sebagai instrumen manajerial yang mendukung pencapaian visi, misi, dan target mutu sekolah. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran pendidikan harus disusun secara terarah, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Mutu sekolah merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga mencakup kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas kepemimpinan sekolah, budaya organisasi, serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan mutu pendidikan yang optimal, sekolah memerlukan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan kebutuhan pembelajaran dengan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan pendidikan menjadi salah satu aspek penting karena hampir seluruh program dan aktivitas sekolah memerlukan dukungan dana yang memadai, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rusdiana, 2021).

Perencanaan pendidikan yang efektif harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata sekolah (needs assessment). Program-program yang dirancang tidak seharusnya hanya mengacu pada pola kegiatan tahun sebelumnya, tetapi harus mampu menjawab tantangan, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan sekolah secara aktual. Pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan memungkinkan sekolah menentukan prioritas program secara lebih rasional, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya keuangan. Sianturi (2024) menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan sekolah, sumber pendanaan, mekanisme penggunaan anggaran, serta sistem pertanggungjawaban agar pelaksanaan program pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu instrumen utama dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di sekolah adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS berfungsi sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan sekolah selama satu tahun anggaran. Penyusunan RKAS yang berkualitas dapat membantu sekolah menjaga konsistensi antara program yang direncanakan dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, RKAS juga menjadi sarana pengendalian penggunaan dana agar tetap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Sigalingging,

Saragih, dan Tamba (2025) menunjukkan bahwa RKAS memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Meskipun demikian, implementasi penganggaran pendidikan di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber pendanaan, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, keterlambatan pencairan dana, kurangnya kapasitas teknis pengelola keuangan, serta lemahnya sistem evaluasi berbasis kinerja merupakan beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan anggaran. Akibatnya, sebagian anggaran sekolah masih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin dibandingkan mendukung program-program strategis yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Rahmadhea (2025) menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana pendidikan tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan mutu sekolah apabila tidak dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik.

Dalam pengelolaan anggaran pendidikan, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan. Transparansi mencerminkan keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap penggunaan dana melalui mekanisme pelaporan, dokumentasi, dan evaluasi yang terukur. Penelitian Sartika, Masduki, dan Rochimah (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan yang transparan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perencanaan dan penganggaran pendidikan. Kepala sekolah, guru, bendahara, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tidak hanya memperkuat rasa memiliki (sense of ownership), tetapi juga meningkatkan fungsi pengawasan dan meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan dana. Ningsih dan Hapsari (2025) menjelaskan bahwa keterlibatan komite sekolah serta pemanfaatan sistem pelaporan digital seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dapat meningkatkan akuntabilitas dan membantu sekolah dalam menyusun anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional.

Pada satuan pendidikan kejuruan, kompleksitas perencanaan dan penganggaran pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah umum. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak hanya memerlukan pendanaan untuk kegiatan pembelajaran reguler, tetapi juga untuk penyelenggaraan praktik kejuruan, pengadaan alat dan bahan praktik, pemeliharaan laboratorium dan bengkel, sertifikasi kompetensi, praktik kerja lapangan (PKL), serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, SMK

membutuhkan sistem penganggaran yang lebih terencana dan tepat sasaran agar mampu mendukung pengembangan kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan dunia kerja. Syata dkk. (2025) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran, kompetensi guru, serta kesiapan lulusan dalam menghadapi tuntutan pasar kerja.

SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati merupakan dua sekolah menengah kejuruan negeri yang memiliki karakteristik, kebutuhan program, dan tantangan pengelolaan sumber daya yang berbeda. Kedua sekolah dituntut untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, kompetensi keahlian, kondisi sarana prasarana, serta target peningkatan mutu sekolah. Perbedaan kondisi internal dan eksternal masing-masing sekolah berpotensi memengaruhi proses penetapan prioritas program maupun alokasi anggaran. Oleh karena itu, studi komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kendala, serta praktik-praktik terbaik (best practices) dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan pada kedua sekolah tersebut.

Urgensi kajian mengenai perencanaan dan penganggaran pendidikan semakin meningkat seiring dengan tuntutan tata kelola pendidikan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada mutu. OECD (2022) menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah (value for money), peningkatan kualitas hasil belajar, serta pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, UNESCO (2021) menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang mampu mendukung pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks sekolah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program berbasis kebutuhan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, serta pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan. Setiap kebijakan penganggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan profesional guru, dan peningkatan layanan kepada peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan sebagai instrumen peningkatan mutu sekolah pada SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati. Fokus penelitian meliputi proses penyusunan perencanaan sekolah, penganggaran melalui RKAS, penetapan prioritas program, keterlibatan pemangku kepentingan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, evaluasi penggunaan anggaran, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komparatif yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan perencanaan dan penganggaran pendidikan pada kedua sekolah tersebut.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan

membandingkan optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan sebagai instrumen peningkatan mutu sekolah pada SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah serta merumuskan strategi perbaikan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perencanaan dan penganggaran pendidikan berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji fenomena sosial, kebijakan pendidikan, pengalaman para informan, serta praktik manajerial yang berlangsung dalam penyelenggaraan pendidikan (Sugiyono, 2022).

Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pendidikan, meliputi penyusunan program sekolah, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penetapan prioritas anggaran, partisipasi pemangku kepentingan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta evaluasi penggunaan anggaran. Sementara itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan praktik perencanaan dan penganggaran pendidikan di dua sekolah, yaitu SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati Kabupaten Majalengka. Melalui perbandingan tersebut diharapkan dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, kendala, serta strategi optimalisasi pengelolaan anggaran yang diterapkan pada masing-masing sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati Kabupaten Majalengka. Kedua sekolah dipilih karena merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang memiliki kebutuhan pengelolaan pembiayaan yang relatif kompleks, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran praktik, pengembangan kompetensi guru, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik dan prioritas pengembangan sekolah yang memungkinkan dilakukan analisis perbandingan secara lebih komprehensif.

Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, bendahara sekolah atau bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan peserta didik. Kepala sekolah dipilih karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan sekolah. Bendahara dipilih karena berperan dalam pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. Guru dipilih karena memahami kebutuhan pembelajaran dan implementasi program pendidikan. Komite sekolah dilibatkan karena memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah, sedangkan peserta didik dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sekolah.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi sekolah, seperti RKAS, Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), laporan penggunaan dana BOS, notulen rapat, laporan kegiatan sekolah, data sarana dan prasarana, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pendidikan. Penggunaan berbagai sumber data dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan meningkatkan objektivitas hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait proses perencanaan, penyusunan anggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi pengelolaan keuangan sekolah. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta berbagai fasilitas pendukung mutu pendidikan. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran sekolah. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber informasi saja (Creswell & Creswell, 2022).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas merancang penelitian, melakukan pengumpulan data, mengamati kondisi lapangan, menelaah dokumen, serta menafsirkan data yang diperoleh. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, daftar periksa dokumen, dan catatan lapangan. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yang mencakup perencanaan pendidikan, penganggaran pendidikan, transparansi, akuntabilitas, evaluasi anggaran, dan mutu sekolah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel perbandingan, dan ringkasan temuan agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, persamaan, dan perbedaan yang ditemukan selama proses analisis.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan peserta didik. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber maupun satu metode pengumpulan data (Sugiyono, 2022).

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi penyusunan instrumen penelitian, penentuan informan, serta pengurusan perizinan penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada kedua sekolah. Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian. Tahap keempat berupa penyusunan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis perbandingan antara temuan di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan serta penyusunan rekomendasi terkait optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan.

Fokus analisis penelitian diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu proses penyusunan perencanaan sekolah, penyusunan RKAS, dasar penetapan prioritas anggaran, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi penggunaan dana, akuntabilitas pelaporan keuangan, evaluasi pengelolaan anggaran, berbagai kendala yang dihadapi sekolah, serta kontribusi penganggaran terhadap peningkatan mutu pendidikan. Seluruh temuan tersebut kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif sekaligus aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan pada masing-masing sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan Pendidikan di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pendidikan di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati merupakan tahap awal yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan program sekolah selama satu tahun anggaran. Proses perencanaan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kebutuhan pembelajaran, pelaksanaan praktik kejuruan, peningkatan kompetensi guru, pengelolaan sarana dan prasarana, kegiatan peserta didik, serta upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Kedua sekolah menempatkan perencanaan sebagai instrumen strategis yang mendasari penyusunan program kerja dan pengalokasian anggaran sekolah.

Di SMKN 1 Panyingkiran, perencanaan pendidikan lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan penguatan fasilitas praktik kejuruan. Fokus tersebut didasarkan pada karakteristik sekolah kejuruan yang memerlukan ketersediaan alat dan bahan praktik yang memadai guna mendukung pencapaian kompetensi peserta didik sesuai bidang keahlian masing-masing. Selain itu, perencanaan juga diarahkan pada peningkatan kompetensi guru, pengembangan kemampuan peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif.

Sementara itu, di SMKN 1 Kertajati, perencanaan pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dengan penekanan yang lebih besar pada penguatan program keahlian, pengembangan aktivitas peserta didik, dan optimalisasi potensi lingkungan sekolah. Program yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif harus berangkat dari kebutuhan riil sekolah agar

program yang disusun memiliki relevansi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sianturi (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan sekolah, ketersediaan sumber daya, serta tujuan pendidikan yang hendak dicapai sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

b. Penyusunan RKAS sebagai Dasar Penganggaran Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi dokumen utama yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan di kedua sekolah. RKAS berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan program kegiatan, alokasi anggaran, sumber pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan adanya RKAS, pelaksanaan program sekolah dapat berlangsung secara lebih terarah dan sistematis.

Pada SMKN 1 Panyingkiran, RKAS digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, praktik kejuruan, pengembangan sarana dan prasarana, serta program pengembangan peserta didik. Mengingat kebutuhan sekolah kejuruan relatif besar, sementara ketersediaan dana terbatas, sekolah menerapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Program yang secara langsung mendukung peningkatan mutu pembelajaran ditempatkan sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, SMKN 1 Kertajati memanfaatkan RKAS sebagai instrumen pengendalian program dan anggaran yang mencakup berbagai bidang, seperti kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, hubungan industri, serta administrasi sekolah. Oleh karena itu, RKAS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis yang memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan dan tujuan pengembangan sekolah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Siregar, Sigalingging, Saragih, dan Tamba (2025) yang menyatakan bahwa RKAS memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan karena disusun berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, RKAS tidak hanya menjadi daftar kegiatan dan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan dan Penganggaran

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan kontribusi dalam bentuk masukan, pertimbangan, dan pengawasan terhadap penyusunan program maupun penetapan prioritas anggaran.

Guru memiliki peran strategis karena memahami kebutuhan pembelajaran dan praktik di lapangan. Bendahara berperan dalam memastikan kesesuaian perencanaan

dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Komite sekolah berfungsi memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan, sedangkan kepala sekolah bertindak sebagai pengambil keputusan utama yang mengarahkan seluruh proses perencanaan agar tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah.

Pada kedua sekolah, partisipasi pemangku kepentingan dinilai perlu terus ditingkatkan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan sekolah. Perencanaan yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan tersusunnya program yang lebih tepat sasaran, realistis, dan memperoleh dukungan dari seluruh warga sekolah.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Rusdiana (2021) yang menegaskan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sehingga dana pendidikan dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

d. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran melalui laporan keuangan, bukti transaksi, dan hasil evaluasi kegiatan.

Di SMKN 1 Panyingkiran, transparansi diwujudkan melalui rapat sekolah, rapat komite, penyampaian laporan penggunaan dana, serta penyebarluasan informasi kepada warga sekolah. Praktik yang sama juga diterapkan di SMKN 1 Kertajati melalui komunikasi terbuka antara pihak sekolah, komite sekolah, guru, dan orang tua peserta didik. Keterbukaan informasi tersebut menjadi penting untuk membangun kepercayaan serta mencegah munculnya kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran sekolah.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran tercermin dari ketersediaan dokumen RKAS, laporan realisasi anggaran, bukti pengeluaran, serta pelaksanaan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Kelengkapan administrasi tersebut memudahkan sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak internal maupun eksternal. Selain itu, proses akuntabilitas juga menjadi sarana untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Sartika, Masduki, dan Rochimah (2025) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan mutu sekolah. Selain itu, Ningsih dan Hapsari (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan sistem pelaporan digital serta keterlibatan komite sekolah berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

e. Perbandingan Perencanaan dan Penganggaran pada Kedua Sekolah

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dalam praktik

perencanaan dan penganggaran pendidikan. Persamaan utama terlihat pada penggunaan RKAS sebagai pedoman utama pengelolaan program dan anggaran, pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan prioritas kebutuhan masing-masing sekolah. SMKN 1 Panyingkiran lebih menitikberatkan pengalokasian anggaran pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan penguatan fasilitas praktik kejuruan. Sebaliknya, SMKN 1 Kertajati lebih menekankan pengembangan program keahlian, aktivitas peserta didik, dan penguatan kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan dan penganggaran sangat dipengaruhi oleh kondisi, kebutuhan, potensi, serta strategi pengembangan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

Dengan demikian, optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap satuan pendidikan agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan mutu sekolah.

Aspek	SMKN 1 Panyingkiran	SMKN 1 Kertajati
Dasar perencanaan	Kebutuhan pembelajaran, praktik kejuruan, dan sarana prasarana.	Kebutuhan pembelajaran, pengembangan program kejuruan, dan potensi sekolah.
Dokumen utama	RKAS, RKT, dan dokumen pendukung sekolah.	RKAS, RKT, dan dokumen pendukung sekolah.
Prioritas anggaran	Pengadaan alat praktik, bahan praktik, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan peserta didik.	Penguatan kompetensi kejuruan, kegiatan peserta didik, sarana pembelajaran, dan kerja sama eksternal.
Keterlibatan pihak sekolah	Kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah.	Kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah.
Transparansi	Dilaksanakan melalui rapat sekolah dan laporan penggunaan dana.	Dilaksanakan melalui rapat, keterlibatan komite, dan dokumen pertanggungjawaban.
Kendala	Keterbatasan dana dan tingginya kebutuhan pembelajaran praktik.	Keterbatasan dana dan kebutuhan pengembangan program sekolah.
Dampak terhadap mutu sekolah	Mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kegiatan praktik.	Mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi, dan layanan sekolah.

Tabel. Ringkasan Perbandingan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua sekolah memiliki kesamaan dalam penggunaan RKAS sebagai dokumen utama penganggaran dan dalam pelibatan pemangku kepentingan sekolah. Namun, terdapat perbedaan pada fokus prioritas anggaran dan strategi pengembangan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing sekolah.

f. Perbandingan Perencanaan dan Penganggaran pada Kedua Sekolah

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati memiliki tujuan yang sama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran pendidikan, yaitu mendukung peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan oleh masing-masing sekolah menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kondisi internal, kebutuhan, potensi, serta prioritas pengembangan yang berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa sistem penganggaran pendidikan perlu dirancang secara fleksibel dan adaptif agar mampu mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan spesifik setiap satuan pendidikan.

g. Kontribusi Penganggaran Pendidikan terhadap Mutu Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah apabila dialokasikan pada program-program yang secara langsung mendukung proses pembelajaran. Penggunaan anggaran untuk penyediaan alat praktik, bahan ajar, media pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pemeliharaan sarana dan prasarana terbukti mampu memperkuat kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

Pada sekolah menengah kejuruan, mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran praktik dan perkembangan industri. Ketersediaan fasilitas praktik yang memadai memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal, sedangkan keterbatasan fasilitas berpotensi menghambat pencapaian kompetensi yang diharapkan. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran praktik sekaligus memperkuat daya saing lulusan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Syata, Sabillah, dan Lewa (2025) yang menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan dana BOS mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana pendidikan, pengembangan kompetensi guru, serta dukungan terhadap berbagai aktivitas belajar peserta didik. Dengan demikian, penganggaran yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap mutu sekolah, terutama ketika diarahkan pada kebutuhan yang secara langsung mendukung proses pembelajaran.

Selain aspek pembelajaran, kualitas sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting yang memengaruhi mutu pendidikan. Argyanti, Nuurshafa, Haikal, dan Munawwaroh (2026) menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan kondusif bagi peserta didik. Oleh sebab itu, alokasi

anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan perlu dipandang sebagai investasi strategis dalam mendukung peningkatan mutu sekolah.

h. Kendala dalam Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama dalam optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki sekolah. Sebagai lembaga pendidikan kejuruan, kebutuhan pendanaan relatif tinggi karena harus mendukung pengadaan alat praktik, bahan praktik, pemeliharaan laboratorium dan bengkel, peningkatan kompetensi guru, serta berbagai kegiatan pengembangan peserta didik. Di sisi lain, dana yang tersedia sering kali belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut secara optimal.

Selain keterbatasan anggaran, perubahan kebutuhan sekolah yang bersifat dinamis juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penganggaran. Perubahan tersebut dapat berupa kerusakan alat praktik, kenaikan harga barang dan jasa, kebutuhan kegiatan yang muncul secara mendadak, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Kondisi ini menuntut sekolah untuk memiliki sistem perencanaan yang adaptif tanpa mengabaikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Kendala lainnya berkaitan dengan kapasitas teknis pengelola keuangan sekolah. Pengelolaan anggaran memerlukan kemampuan administratif, pemahaman terhadap regulasi, serta keterampilan dalam mengoperasikan sistem pelaporan berbasis digital. Apabila kompetensi pengelola belum memadai, maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berpotensi mengalami hambatan sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan anggaran.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Abeh, Wan, Batang, Wibawa, Mebang, Warman, dan Fitriadi (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan menghadapi berbagai risiko, seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan alokasi anggaran, kerusakan aset, dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian, pencatatan, dan evaluasi agar kendala yang muncul tidak menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.

i. Strategi Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan

Optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Pertama, sekolah perlu melaksanakan analisis kebutuhan secara berkala sebelum menyusun program dan anggaran. Analisis tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi program, rapat koordinasi dengan guru, peninjauan kondisi sarana dan prasarana, serta penyerapan aspirasi dari peserta didik dan komite sekolah. Pendekatan ini memungkinkan sekolah menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual.

Kedua, sekolah perlu menetapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Program-program yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran harus menjadi fokus utama. Dalam konteks SMK, prioritas tersebut dapat diarahkan pada pengadaan alat dan bahan praktik, peningkatan kompetensi guru produktif, pemeliharaan laboratorium dan bengkel, serta kegiatan yang mendukung kesiapan kerja peserta didik.

Ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran sekolah. Informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana harus disampaikan secara terbuka melalui rapat, laporan tertulis, maupun dokumen pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan.

Keempat, peningkatan kapasitas pengelola anggaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi keuangan, penyusunan RKAS, penggunaan aplikasi pelaporan digital, serta teknik evaluasi program. Istiana, Arindah, dan Firdaussiyah (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif memerlukan proses perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Kelima, sekolah perlu menerapkan evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation). Evaluasi tidak hanya difokuskan pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan laporan administrasi, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Melalui evaluasi berbasis hasil, sekolah dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif untuk memperbaiki program pada periode berikutnya.

Strategi tersebut sejalan dengan pandangan OECD (2022) yang menekankan bahwa investasi pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas hasil belajar, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan penganggaran pendidikan tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi peningkatan mutu pendidikan.

j. Pembahasan Akhir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya peningkatan mutu sekolah. Perencanaan yang disusun secara sistematis memungkinkan sekolah menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan. Sementara itu, penganggaran yang efektif memberikan dukungan terhadap implementasi program sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara lebih optimal. Namun demikian, dampak positif terhadap mutu sekolah hanya dapat terwujud apabila proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta dievaluasi secara berkelanjutan.

SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati sama-sama menghadapi tuntutan untuk mengelola anggaran secara berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kedua sekolah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin, tetapi juga diarahkan pada penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan fasilitas praktik, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kegiatan peserta didik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat mutu pendidikan kejuruan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar yang

relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dengan demikian, optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan mutu sekolah. Pengelolaan anggaran yang terencana dan tepat sasaran memungkinkan sekolah menyusun program yang lebih efektif, memanfaatkan sumber daya secara efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pendidikan merupakan dua komponen strategis yang memiliki keterkaitan erat dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Di SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan program-program prioritas, sedangkan penganggaran berperan sebagai instrumen pendukung untuk merealisasikan program tersebut. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan pelaksanaan program sekolah sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang terencana, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pendidikan pada kedua sekolah disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan strategis, antara lain kegiatan pembelajaran, praktik kejuruan, peningkatan kompetensi guru, pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan peserta didik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan kejuruan, kedua sekolah memiliki karakteristik kebutuhan pembiayaan yang lebih kompleks dibandingkan sekolah umum karena harus mendukung penyelenggaraan pembelajaran praktik, pengadaan alat dan bahan praktik, serta penguatan kompetensi lulusan agar sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Pengelolaan anggaran pendidikan di kedua sekolah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berfungsi sebagai dokumen utama dalam mengatur program, alokasi dana, sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Penyusunan RKAS yang dilakukan secara sistematis terbukti membantu sekolah dalam mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Persamaan yang ditemukan antara SMKN 1 Panyingkiran dan SMKN 1 Kertajati meliputi penggunaan RKAS sebagai instrumen utama pengelolaan anggaran, pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta perlunya evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Adapun perbedaannya terletak pada fokus prioritas pengembangan masing-masing sekolah. SMKN 1 Panyingkiran lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan penguatan fasilitas praktik, sedangkan SMKN 1 Kertajati lebih berfokus pada pengembangan program kejuruan, peningkatan aktivitas peserta didik, dan penguatan mutu pendidikan sesuai karakteristik sekolah.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan,

antara lain keterbatasan sumber dana, tingginya kebutuhan pembelajaran praktik, fluktuasi harga barang dan jasa, perkembangan kebutuhan sekolah yang dinamis, serta masih perlunya peningkatan kompetensi teknis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Berbagai kendala tersebut memerlukan penanganan melalui perencanaan yang lebih komprehensif, penetapan prioritas yang tepat, pengawasan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, optimalisasi perencanaan dan penganggaran pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu sekolah apabila dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan dana, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, penguatan kegiatan peserta didik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

SARAN

1. **Bagi Kepala Sekolah**
   Kepala sekolah perlu memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan dengan memastikan bahwa setiap program yang dituangkan dalam RKAS benar-benar mencerminkan kondisi, tantangan, dan prioritas pengembangan sekolah. Perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
2. **Bagi Bendahara dan Tim Pengelola Keuangan Sekolah**
   Bendahara dan tim pengelola anggaran perlu meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan melalui pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan dokumen pertanggungjawaban yang lebih tertib dan sistematis. Pemanfaatan aplikasi digital, seperti ARKAS, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses monitoring serta evaluasi anggaran.
3. **Bagi Guru**
   Guru perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan program dan anggaran sekolah karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pembelajaran, sarana praktik, bahan ajar, media pembelajaran, serta karakteristik peserta didik. Keterlibatan guru akan membantu sekolah menyusun program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
4. **Bagi Komite Sekolah**
   Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta mendukung pelaksanaan program-program sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi aktif komite sekolah juga dapat memperkuat prinsip transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah.
5. **Bagi Sekolah**
   Sekolah perlu melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala dan berorientasi pada hasil. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga pada dampak nyata penggunaan anggaran

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan fasilitas praktik, kompetensi guru, serta perkembangan peserta didik.

6. **Bagi Peneliti Selanjutnya**
   Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak sekolah, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), serta mengkaji hubungan antara pengelolaan anggaran pendidikan dan indikator mutu sekolah secara lebih terukur sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abeh, Y. A., Wan, M., Batang, S., Wibawa, R., Mebang, D. N., Warman, W., & Fitriadi, A. (2025). Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah negeri. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(1), 2445–2454.

Argyanti, C. A., Nuurshafa, E. P., Haikal, M. F., & Munawwaroh, Z. (2026). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. *Jurnal Tahsinia, 7*(1), 79–93.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Istiana, L., Arindah, P. N., & Firdaussiyah, A. (2025). Implementasi manajemen anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 12 Semarang. *Jurnal Media Akademik, 3*(5), 1–25.

Ningsih, S., & Hapsari, A. N. (2025). Optimalisasi pembiayaan pendidikan: Studi kasus dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang. *Jurnal Media Akademik, 3*(5), 1–21.

OECD. (2022). *Value for money in school education: Smart investments, quality outcomes, equal opportunities*. Paris: OECD Publishing.

Rahmadhea, S. (2025). Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 1*(1), 43–55.

Rusdiana, A. (2021). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Filosofi, konsep, dan aplikasi*. Bandung: TRESNA BHAKTI Press.

Sartika, D., Masduki, & Rochimah, H. (2025). Akuntabilitas transparansi pengelolaan BOS dalam optimalisasi mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 10*(2), 697–707.

Sianturi, R. (2024). *Perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan: Konsep dan teknik*. Tasikmalaya: Edu Publisher.

Siregar, R. J., Sigalingging, S. A. P., Saragih, M. D., & Tamba, M. S. (2025). Analisis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. *Central Publisher, 3*(6), 3743–3751.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syata, W. M., Sabillah, B. M., & Lewa, M. J. (2025). Optimalisasi dana BOS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1*(4), 518–524.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing